

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa petugas koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Peraturan tersebut mengindikasikan kepada badan usaha khususnya koperasi untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dimana standar akuntansi untuk koperasi yaitu SAK ETAP. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan.

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (1990) dalam Hidayatullah & Sulhani (2018) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan

dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu, kelompok maupun badan usaha cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Afriyeni dan Doni, 2019). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan koperasi yang berusaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan penyusunan yang sesuai standar akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk para pengguna laporan tersebut.

2.1.2 Koperasi

2.1.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi biasanya dikaitkan dengan upaya-upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama (Sitio dan Halomon, 2001). Dalam melakukan usahanya, koperasi menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip

koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu. Prinsip-prinsip koperasi memuat sejumlah nilai, norma dan tujuan konkrit.

2.1.2.2 Jenis – Jenis Koperasi

Di Indonesia berdiri beberapa jenis koperasi, antara lain :

1. Koperasi Produksi / Koperasi Produsen

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Terdapat berbagai macam bentuk koperasi produksi, seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Koperasi produksi / Koperasi Produsen juga dapat diartikan sebagai koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku & penolong untuk anggotanya.

2. Koperasi Konsumsi / Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Kegiatan utama koperasi ini adalah membeli barang atau jasa. Koperasi Komsumen menjembatani produsen dengan konsumen yang membutuhkan barang-barang atau jasa, atau bisa dibilang koperasi ini bisa disebut perantara antara produsen dan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) umumnya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha (KSU) ialah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi & Koperasi Simpan Pinjam.

2.1.2.3 Prinsip Akuntansi Koperasi

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XX/2015 yang berisi laporan keuangan harus disusun atas dasar akrual. Oleh sebab itu, pengaruh transaksi dan peristiwa lain akan diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang dapat digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan. Dalam Undang – Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan

tahunan yang memuat sekurang – kurangnya neraca, penghitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Sadeli dan Lili (2002:2), laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi histories. Adapun arti akuntansi ialah proses pengidentifikasian, mengukur serta melaporkan informasi ekonomi guna membentuk pertimbangan dan upaya mengambil keputusan yang tepat oleh pengguna informasi tersebut.

Tujuan laporan keuangan dalam SAK ETAP (2009) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.1.4.1 Ruang Lingkup SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:
 - a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM- LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
 - b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal tersebut antara lain adalah kreditor, pemilik yang tidak terlibat langsung, investor, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.1.4.2 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam BAB 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP,

dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2.1.4.3 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) laporan keuangan SAK ETAP terdiri dari:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban-kewajiban diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos- pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan

perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

a. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut.

b. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari

laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

4. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

a. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

b. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akusisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan SAK ETAP bab 8.2 catatan atas laporan keuangan harus menyajikan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu ;
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK ETAP tetapi tidak disyaratkan dalam laporan keuangan;
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.4.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

1. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.1.4.5 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai alat berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu laporan keuangan harus menyediakan informasi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009) adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

2.1.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi – potensi pribadinya, yaitu rokhani

dan jasmani (Rodliyah, 2013:37). Pendidikan adalah sebuah jembatan untuk seseorang dalam memperbaiki kehidupannya dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Jenis -jenis pendidikan menurut Adawiyah (2016) antara lain sebagai berikut :

- a. Lingkungan informal (keluarga) adalah lingkungan atau tempat berkumpulnya individu satu dengan individu lainnya dalam satu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah.
- b. Lingkungan formal (sekolah) adalah lingkungan tempat berkumpulnya individu satu dengan individu lain di sebuah tempat belajar/sekolah.
- c. Lingkungan nonformal (masyarakat) adalah lingkungan atau tempat berkumpulnya individu satu dengan individu lainnya dalam satu lingkungan, baik dalam lingkungan desa satu ataupun dengan desa lainnya.

2.1.6 Ukuran Usaha

Ukuran usaha merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Anisyruklillah dan Rezqika (2019) ukuran usaha merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva, total pendapatan, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki

perusahaan. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang tertanam dalam perusahaan tersebut, semakin banyak penjualan yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar (Zahri, 2014). Jumlah karyawan yang dipekerjakan juga dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan tersebut, semakin banyak karyawan yang dipekerjakan maka ukuran perusahaan tersebut juga semakin besar. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan juga dapat menunjukkan perputaran aset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Firdaus Putra (2019) untuk melihat ukuran koperasi dapat menggunakan dimensi – dimensi berikut ini :

- a. Dimensi mikro organisasi, yakni melihat koperasi sebagai asosiasi individu.
- b. Dimensi meso-organisasi, yakni melihat koperasi sebagai sebuah perusahaan yang sama dengan lainnya. Kaidah-kaidah perusahaan harus digunakan secara lazim sebagaimana mestinya.
- c. Dimensi makro-organisasi, yakni meletakkan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi sebagaimana Pasal 33 UUD 1945.

2.1.7 Sosialisasi Standar Akuntansi

Sosialisasi merupakan suatu aktivitas dengan tujuan memberi ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat dimana orang tersebut menjadi salah satu anggotanya. Menurut Soerjono Soekanto (1990) dalam Elisani (2009 :86), dalam proses sosialisasi seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk

berperilaku yang sesuai dengan sikap orang – orang disekitarnya. Melalui sosialisasi seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar menjadi pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sedangkan sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan ETAP merupakan suatu aktivitas dengan tujuan memberi ketrampilan dan pengetahuan kepada calon pengguna SAK ETAP agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengkoordinasikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yakni SAK ETAP. Diperlukan adanya kontinuitas dan konsistensi untuk mensosialisasikan SAK ETAP ke seluruh pihak terkait secara menyeluruh di seluruh Indonesia guna meningkatkan pengetahuan mengenai SAK ETAP (Anisykurlillah dan Rezqika, 2019). Sosialisasi dapat dilakukan melalui media seperti koran, majalah atau internet, selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan oleh pemerintah melalui seminar atau pelatihan tentang akuntansi (Nurwidjayanti dan Sulistiningsih, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

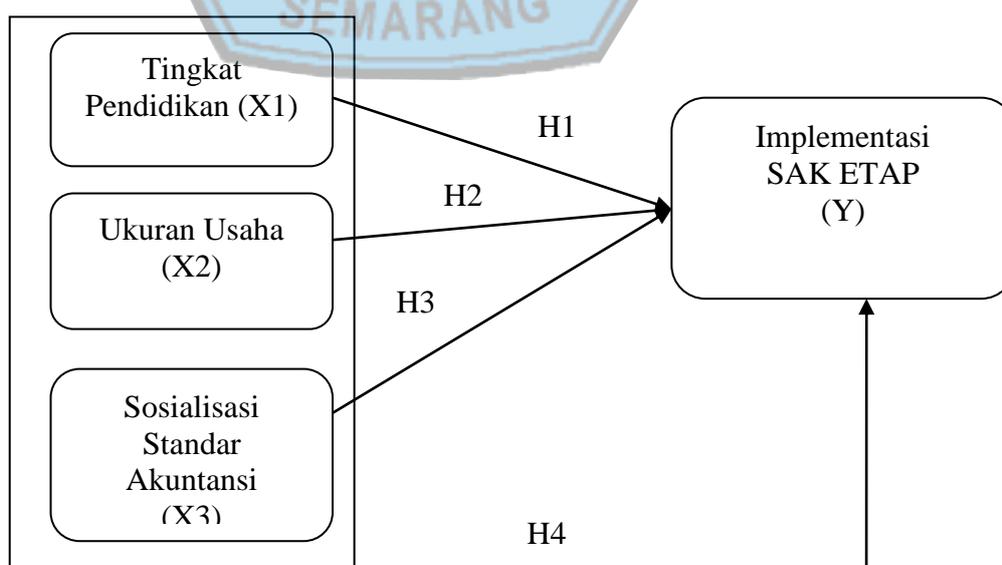
No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil yang Diperoleh
1.	Tuti dan Dwijayanti (2014)	Independen : 1. Pemberian informasi 2. Jenjang pendidikan pemilik usaha 3. Latar Belakang pendidikan 4. Ukuran usaha 5. Lama Usaha Dependen : Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	Secara Parsial : Informasi dan sosialisasi (INFO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

		ETAP.	<p>Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.</p> <p>Lama usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.</p> <p>Ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.</p>
2.	Masitoh dan Widayanti (2015)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Tingkat Pemahaman 3. Motivasi 4. Kepribadian <p>Dependen : Penerapan SAK ETAP</p>	<p>Secara parsial : Sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p> <p>Tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p> <p>Motivasi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p> <p>Kepribadian berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p>
3.	Pratiwi dan Hanafi (2016)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan pemilik 2. Pemahaman Teknologi 3. Karakteristik Laporan Keuangan 4. Ukuran Usaha <p>Dependen : Penerapan SAK ETAP</p>	<p>Secara parsial : Pendidikan pemilik berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p> <p>Pemahaman teknologi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP</p> <p>Karakteristik laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP</p>

			Ukuran usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP
4.	Rahmawati dan Puspasari (2017)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Usaha 2. Lama Usaha 3. Informasi dan Sosialisasi 4. Latar Belakang Pendidikan 5. Pendidikan Terakhir 6. Besarnya Profesionalisme <p>Dependen :</p> <p>Pemahaman Pengusaha terkait Implementasi SAK ETAP</p>	<p>Secara Parsial :</p> <p>variabel ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP.</p> <p>variabel lama usaha berdiri tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP.</p> <p>tingkat informasi dan sosialisai berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP.</p> <p>Latar belakang pendidikan (LB) tidak berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusahaterkait SAK ETAP.</p> <p>Tingkat pendidikan terakhir berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusaha mengenai SAK ETAP.</p> <p>variabel profesional manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha mengenai SAK ETAP.</p>
5.	Anisykurlillah dan Rezqika (2019)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Pendidikan 2. Ukuran usaha 3. Umur Usaha 4. Pemahaman Teknologi 5. Sosialisasi dan Pelatihan <p>Dependen :</p> <p>Implementasi SAK ETAP</p>	<p>Secara Parsial :</p> <p>Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP</p> <p>Ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP</p> <p>Umur usaha berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM</p>

			Pemahaman teknologi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Sosialisasi dan pelatihan berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP.
6.	Oktaritama dan Januarti (2019)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan 2. Pemberian informasi dan sosialisasi 3. Masa Tugas Pekerjaan 4. Latar Belakang Pendidikan <p>Dependen : Pemahaman SAK ETAP</p>	<p>Secara Parsial :</p> <p>Tidak terdapat pengaruh positif antara latar belakang pendidikan terhadap pemahaman bagian akuntansi koperasi atas SAK ETAP. Terdapat pengaruh positif antara pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman bagian akuntansi koperasi atas SAK ETAP.</p> <p>Terdapat pengaruh positif Antara masa tugas pekerjaan terhadap pemahaman bagian akuntansi koperasi atas SAK ETAP. Terdapat pengaruh positif antara jenjang pendidikan terhadap pemahaman bagian akuntansi koperasi atas SAK ETAP.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Peneletian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha dan sosialisasi standar akuntansi terhadap implementasi SAK ETAP. Berikut merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian :

2.4.1 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Implementasi SAK ETAP

Pendidikan merupakan proses mengubah sikap seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan pola berfikir melalui upaya sebuah pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur. Menurut Pratiwi dan Hanafi (2016) tingkat pendidikan pemilik usaha maupun karyawan memiliki pengaruh terhadap kebutuhan informasi akuntansi keuangan dan manajemen. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan penyerapan pengetahuan baru. Oleh sebab itu, dengan tingkat pendidikan bagi karyawan maupun pemilik usaha akan mempengaruhi pemahaman akuntansi terlebih tentang SAK ETAP. Semakin tinggi pemahaman tentu saja akan semakin besar kesempatan dalam mengimplementasikan SAK ETAP pada laporan keuangan entitas. Hasil penelitian Pratiwi dan Hanafi (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Tingkat pendidikan (X1) berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP (Y)

2.4.2 Hubungan Ukuran Usaha Terhadap Implementasi SAK ETAP

Ukuran usaha yaitu skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah organisasi atau perusahaan dengan mengukur nilai aset perusahaan, jumlah

karyawan dan volume penjualan perusahaan tersebut (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa ukuran usaha juga dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya.

Ukuran perusahaan yang besar berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga mampu mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik, dengan karyawan dengan keahlian yang baik diharapkan dapat mengimplementasikan kemampuannya di bidangnya masing – masing, terlebih pada bagian keuangan koperasi yang harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi koperasi saat ini yaitu SAK ETAP. Penelitian Pratiwi dan Hanafi (2016) mendapatkan hasil bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran Usaha (X2) berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP (Y)

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Standar Akuntansi Terhadap Implementasi SAK ETAP

Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan ETAP merupakan suatu aktivitas dengan tujuan memberi ketrampilan dan pengetahuan kepada calon pengguna

SAK ETAP agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengkoordinasikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yakni SAK ETAP. Untuk dapat mengimplementasikan SAK ETAP tentunya diperlukan adanya sosialisasi kepada koperasi agar dapat menerapkan hal – hal yang telah diatur dalam SAK ETAP. Semakin tingginya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha, semakin besar peluang SAK ETAP diimplementasikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh pelaku usaha. Penelitian terdahulu oleh Masitoh dan Widayanti (2015), menyatakan sosialisasi SAK ETAP secara parsial berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi Standar Akuntansi (X3) berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP (Y)

2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ukuran Usaha, Dan Sosialisasi Standar Akuntansi Terhadap Implementasi SAK ETAP

Dari hipotesis – hipotesis yang telah dirumuskan diatas, secara parsial masing – masing variabel penelitian berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Implementasi SAK ETAP berhubungan kuat dengan tingkat pendidikan, ukuran usaha dan sosialisasi standar akuntansi memiliki pengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Maka Perumusan hipotesis yang dapat disimpulkan secara simultan adalah sebagai berikut :

H4 : Tingkat pendidikan, ukuran usaha, dan sosialisasi standar akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP (Y)